

(Tidak) Miskin Informasi Kemiskinan

Oleh : Septianusa (11611096)

Mahasiswa Statistika Universitas Islam Indonesia

Latar belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dinegara manapun. Berbagai program pengentasan kemiskinan banyak dilakukan, seperti bantuan tunai untuk masyarakat “*top down*” hingga program pemberdayaan masyarakat lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan “tepat sasaran”. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Program Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral, dan *charity* terkadang dalam kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang “kurang menguntungkan” misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan). Oleh karena itu penting untuk mengetahui kondisi wilayah penduduk miskin, agar program kemiskinan dapat terlaksana dengan “baik”.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan sekitar 15 (lima belas) program penanggulangan kemiskinan, termasuk program jaring pengaman sosial (JPS), yakni : Program Inpres Desa Tertinggal (IDT); Program pengembangan Kecamatan (PPK); Program Kredit pendayagunaan Teknologi tepat guna dalam rangka pengentasan kemiskinan (KP-TTG-Taskin); Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP); Program Kredit Usaha Tani (KUT); Program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS); Program Operasi Pasar Khusus Beras

(OPK-Beras); Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE); Program JPS-Bidang Pendidikan Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah dan Bantuan Khusus Murid (BKM); Program JPS Bidang Kesehatan; Program Padat Karya Perkotaan (PKP); Program Prakarsa Khusus Penganggur perempuan (PKPP); Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPM-Prasarana Subsidi BBM); Program Dana Bergulir Bahan Bakar Minyak Untuk Usaha Kecil dan Menengah; Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum dapat menunjukkan hasil optimal. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi menyebabkan kemiskinan menjadi permasalahan yang besar di Indonesia

Tersedianya banyak data kemiskinan seharusnya dapat menjadi nilai tambah untuk menjamin keberhasilan sebuah program kemiskinan. “Tumpukan” data-data kemiskinan harus terus digali menjadi informasi baru agar dapat dimanfaatkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK-PPKB), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Basis Data Kemiskinan Terpadu, serta Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan beberapa Lembaga yang menyediakan data-data tersebut .

Peta Kemiskinan

Kendala wilayah geografis yang amat luas dan jumlah penduduk yang amat besar membuat penetapan sasaran masyarakat miskin di Indonesia menjadi lebih berat. Sebagai bagian dari rancangan program untuk mengidentifikasi kelompok sasaran, upaya pemetaan kemiskinan pun dapat di kembangkan. Pendekatan penetapan sasaran yang digunakan adalah dengan mengklasifikasikan wilayah-wilayah administratif di Indonesia ke dalam beberapa kelas.

Pemetaan kemiskinan dalam konsep ini adalah merepresentasi hasil analisa statistik ke dalam peta. Unsur kewilayahan mempunyai korelasi dengan indikator kemiskinan karena penduduk miskin pasti berdomisili di suatu wilayah tertentu. Dengan pemetaan, maka data dapat dilihat penyebarannya secara geografis, selanjutnya data

dapat dianalisis secara spasial untuk mengetahui hubungan antardata dan hubungan terhadap wilayah administratifnya. Tujuan akhirnya adalah dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program kemiskinan yang ada, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target program kemiskinan.

Peta dan Data Besar

Perkembangan teknologi informasi pada abad 21 (dua puluh satu) ini memungkinkan data skala besar dapat terakumulasi dengan cepat sehingga melahirkan “gunungan data” di berbagai bidang, dan data kemiskinan juga mempunyai porsi tersendiri. Menjadi sebuah tantangan untuk menemukan, memvisualisasikan, memahami, dan menganalisis tumpukan data tersebut hingga menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat. Berbeda dengan analisis mengenal pola atau kecenderungan dari tumpukan data pada data mining, pemetaan lebih memberi analisis spasial (ruang) secara parsial yang terbagi dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain data memberikan karakteristik pada wilayah tempat data tersebut “melekat”.

Pemetaan kemiskinan merupakan salah satu cara paling efektif dan efisien untuk menganalisis dan memvisualkan data dan informasi penduduk miskin. Demikian pula dengan analisis terhadap pola dan kecenderungan (*trends*) yang tidak mudah untuk dilakukan bila hanya direpresentasikan dengan menggunakan data (*atribute*) numeris semata, akan sangat mudah dilakukan dengan menggunakan degradasi (atau perbedaan) warna untuk menampilkan informasi kemiskinan. Pemetaan kemiskinan didesain untuk menerima data spasial dan non spasial (teristris) dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan mengintegrasikannya menjadi sebuah informasi. Semakin besar (volume dan akses) data yang dimiliki maka pemetaan kemiskinan yang dilakukan dapat menjadi lebih luas dan spesifik sampai pada wilayah administratif terkecil.

Siapa Penduduk Miskin?

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pertama menghitung garis

kemiskinan makanan dan non makanan, yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing daerah perkotaan dan pedesaan.

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) diperkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan. Formula dasar dalam menghitung adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\dot{HK} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{52}$$

$$GKM = \dot{HK}_{jp} \times 2100$$

Sedangkan nilai kebutuhan minimum non-makanan secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \times V_{kjp}$$

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis kemiskinan di kategorikan sebagai *penduduk miskin* (PM).

Indikator Kemiskinan

Setelah GK didapat, selanjutnya adalah menghitung indikator kemiskinannya. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar digunakan 3 (tiga) indikator kemiskinan. *Head Count Index* (HCI-P₀) yaitu persentase penduduk miskin yang berada dibawah

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

GK. Kedua, indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula Foster-Greer-Thorbecke (1984) dengan ketentuan :

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

$\alpha = 0, 1, 2$

$z =$ garis kemiskinan

$y_i =$ Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

$q =$ Banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n =$ Jumlah penduduk

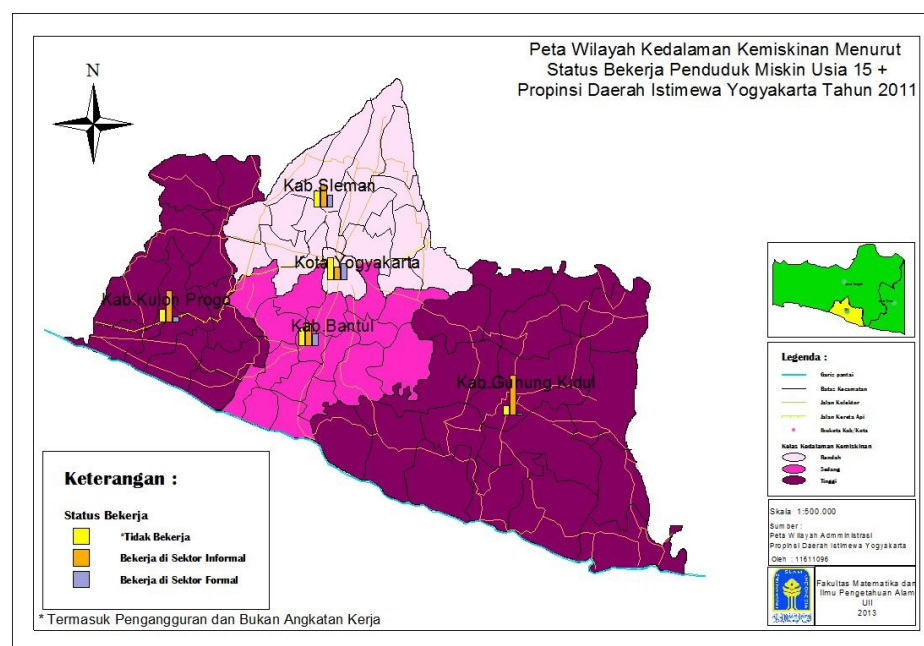
Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), Jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Seerity Index-P₂*)

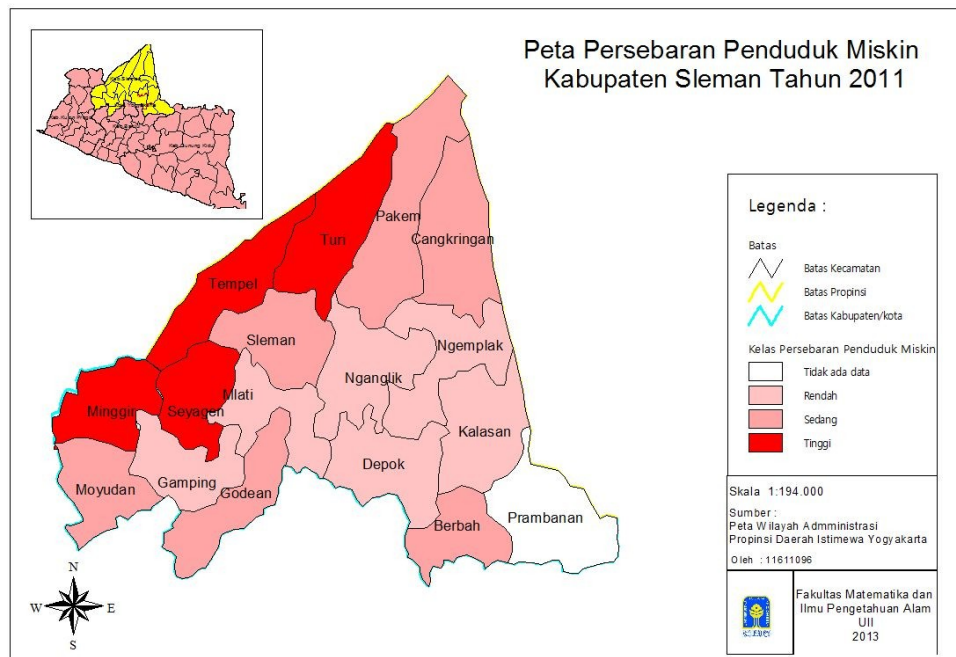
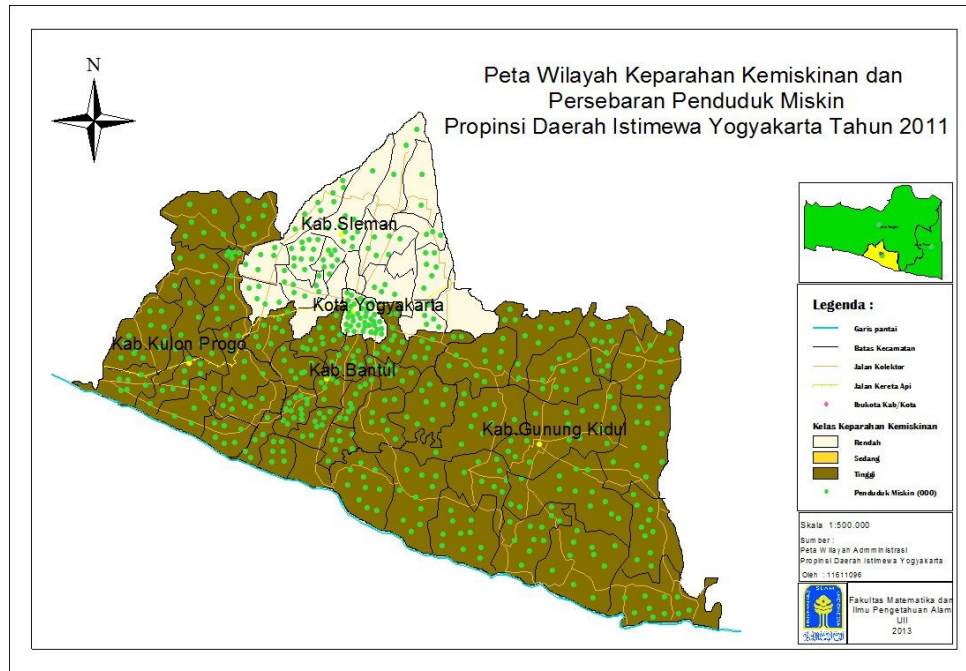
Studi Kasus dan Sumber Data

Studi kasus pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data yang digunakan dalam kasus ini adalah data makro penduduk miskin per kabupaten/kota di DIY dari data Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III, IV tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik DIY dan Data Pengeluaran konsumsi Penduduk per kecamatan Propinsi DIY dari Bappeda DIY. Data makro adalah data yang hanya menunjukkan jumlah agregat, dimana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dari hasil analisa indikator kemiskinan didapat hasil berikut :

Kab/Kota	Jumlah pend.	Persentase	P1	P2	Garis
Kulon Progo	92,8	23,62	3,79	0,91	240.301
Bantul	159,4	17,28	3,00	0,82	264.546
Gunung kidul	157,1	23,03	4,05	0,98	220.479
Sleman	117,3	10,61	1,77	0,45	267.107
Kota Yogyakarta	37,7	9,62	1,19	0,24	314.311

Cara pengolahan dan analisis data adalah pengklasifikasian variabel penyusun potensi penduduk miskin yaitu tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan. Variabel yang digunakan untuk menghitung indikator kemiskinan adalah pengeluaran konsumsi penduduk miskin. Data yang telah diklasifikasikan kemudian akan dilakukan pengharkatan (pemberian nilai). Data yang sudah diharkat kemudian akan diklasifikasikan datanya dengan rumus sturgess menjadi 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah pada setiap indikator kemiskinan. Hasil pengharkatan variabel indikator kemiskinan akan dikompositkan dengan harkat dari variabel status pekerjaan dan Frekuensi penduduk miskin. Dilakukan pemetaan dengan teknik *dot density* dan *chart mapping* sehingga di dapatkan peta wilayah keparahan kemiskinan dan persebaran penduduk miskin dan peta wilayah kedalaman kemiskinan. Sedangkan persebaran penduduk miskin di kabupaten Sleman diperoleh dari pengklasifikasian persentase penduduk miskin perkecamatan di kabupaten Sleman.





Hasil

Persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan yang tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi DIY menunjukkan kecenderungan indeks kemiskinan yang lebih tinggi dan lebih parah di kabupaten Kulon Progo dan Gunung kidul. Tidak hanya pengeluaran untuk konsumsi, tapi sektor kerja juga berhubungan dengan kemiskinan berdasarkan

konsumsi. Sedangkan Sleman dan Yogyakarta termasuk dalam klasifikasi rendah untuk semua indikator kemiskinan. Ada indikasi kuat bahwa penduduk yang berkerja di sektor formal memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Apabila ditinjau menurut kabupaten (Sleman), Kecamatan yang berada disebelah barat semuanya memiliki indeks kemiskinan yang tinggi.

Kesimpulan

Kemiskinan dapat dianalisis berdasarkan kewilayahan mulai skala nasional, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa. Semuanya tergantung dari ketersediaan data yang dimiliki. Perkembangan teknologi basis data dan sistem informasi yang lebih baik sekarang ini sangat membantu dalam hal pengolahan dan analisis data. Sehingga pemetaan kemiskinan mampu memberikan analisis lebih detail berdasarkan analisis wilayah kecil (*small area analysis*) atau tingkat administratif yang lebih kecil, misalnya kelurahan. Harapannya suatu saat nanti dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan pemetaan bukan hanya pada daerah miskin melainkan mampu memberikan informasi sampai pada tingkat individu penduduk miskin.

Ketika dapat mengimbangi kecepatan dan volume nya, data besar justru menjadi sebuah peluang. Masalah bukan terletak pada jumlah dan kecepatan data yang dimiliki, melainkan pada metode analisis yang tepat dan (alat) teknologi yang mendukung. Dengan kata lain, dengan dukungan lembaga-lembaga yang menyediakan data kemiskinan “*Tidak miskin informasi kemiskinan merupakan sebuah pilihan*” yang harus diambil. *So lets data talk.*

Lampiran :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j provinsi p

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

j = Daerah (pedesaan/perkotaan)

p = Provinsi ke-p

$$\acute{HK} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{52}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p

\acute{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM = \acute{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \times V_{kjp}$$

GKNM_{jp} = Pengeluaran minimum non- makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa)

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

P = provinsi (perkotaan atau perdesaan)

Referensi :

Arinkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Prahasta, Eddy . 2004. *Sistem Informasi Geografis : Tools dan Plug-ins*. Bandung : Penerbit Informatika

Tim Kementrian Pekerjaan Umum. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum

Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.

Buku Analisis Kemiskinan Makro Indonesia tahun 2011

Lembaga Penelitian Smeru. *Menuju kebijakan Promasyarakat Miskin melalui Kemiskinan*. 2008